

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Administrasi adalah suatu hal yang sangat penting dalam abad modern sekarang ini. Charles A. Beard seorang sarjana ilmu sosial, yang dikutip dari buku Sondang P. Siagian berkata bahwa :

Tidak ada satu hal untuk abad modern sekarang ini yang lebih penting dari administrasi. Kelangsungan hidup pemerintahan yang beradab dan malahan kelangsungan hidup dari peradaban itu sendiri akan sangat tergantung atas kemampuan kita untuk membina dan mengembangkan suatu filsafat administrasi yang mampu memecahkan masalah-masalah masyarakat modern.¹

Bangsa Indonesia yang sedang giat-giatnya membangun untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur merata materil dan spritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 sudah tentu membutuhkan dukungan administrasi yang mampu memecahkan masalah-masalah pembangunan. Dalam rangka pembangunan nasional yang berencana yang dilakukan secara bertahap, maka administrasi merupakan sarana yang mutlak diperlukan bagi keberhasilan pembangunan nasional.

Pembangunan nasional hanya akan berhasil dengan baik apabila diimbangi dengan administrasi pemerintah yang efektif dan efisien, yang melaksanakan tugas-tugas pemerintah yang dapat mendukung tugas yang bersifat pembangunan.

¹ Sondang P. Siagian, *Filsafat Administrasi*, Gunung Agung, Jakarta, 1997, hal. 1.

Bantu Apa ini

Pemerintah telah menetapkan kebijaksanaan, bahwa dalam pelaksanaan pembangunan, usaha-usaha pembangunan (penyempurnaan) administrasi Pemerintah selalu mendapat perhatian yang sungguh-sungguh. Sehubungan dengan itu maka salah satu aspek pembangunan ialah penyempurnaan administrasi pemerintahan dan merupakan bagian yang integral pada pembangunan nasional.

Sejalan dengan itu maka Pemerintah Daerah Kota Medan Binjai salah satu daerah otonom, dengan berdasarkan Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 menyelenggarakan pembangunan daerah yang mengarah kepada otonomi daerah yang nyata dinamis dan bertanggung-jawab dalam rangka membina kesatuan bangsa atas dasar keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia.

Untuk mewujudkan hal tersebut maka pada setiap daerah Kabupaten/Kota dibentuk Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat yang mempunyai tugas dan fungsi membina kehidupan sosial politik di wilayah kerjanya sebagai salah satu aspek yang dapat mendukung kelancaran pembangunan daerah. Mengingat pentingnya tugas dan fungsi tersebut maka kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Kota Binjai perlu ditunjang dengan sistem administrasi yang baik pula.

Administrasi diartikan secara sederhana sebagai suatu bentuk kerjasama sekelompok orang untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Dengan hal tersebut maka dapatlah dikatakan bahwa kantor dimana tata usaha dijalankan tidak lagi dipandang sebagai kerja tambahan saja dalam suatu organisasi tetapi telah merupakan bagian